

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Indeks Pembangunan Manusia**

*United Nation for Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 telah menerbitkan suatu indikator yaitu *Human Development Indeks (HDI)* atau yang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Human Development Indeks* ini digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan disuatu negara. *Human Development Indeks (HDI)* diterbitkan dalam bentuk laporan tahunan mengenai kinerja HDI pada negara-negara di dunia.

*Human Development Report (1990)* menyebutkan bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia (*“a process of enlarging people’s choices”*). Berdasarkan pengertian tersebut, penduduk merupakan tujuan akhir dari pembangunan, untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan sarana (*principal means*) sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan. Sehingga, definisi dari pembangunan harus dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi saja.

Menurut Pambudi dalam Kacabiru (2013) terdapat enam alasan pentingnya paradigma pembangunan manusia, yaitu : (1) Peningkatan

harkat dan martabat manusia merupakan tujuan akhir dari pembangunan; (2) Pemberantasan masalah kemiskinan; (3) Peningkatan produktivitas dan peningkatan kontrol atas barang dan jasa secara maksimal; (4) Pemeliharaan konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem; (5) Peningkatan basis *civil society* untuk pengembangan demokrasi; dan (6) Merawat stabilitas politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan.

Menurut UNDP dalam HDR (2015) Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Berdasarkan skala Internasional angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah semakin baik. Status pembangunan manusia tersebut dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- a)  $IPM < 50$  (rendah)
- b)  $50 = IPM < 80$  (sedang/menengah)
- c)  $IPM = 80$  (tinggi)

Menurut UNDP dalam Sari (2016), pembangunan manusia memiliki premis-premis penting, yaitu :

- 1) Penduduk harus diutamakan sebagai pusat perhatian dalam pembangunan.

- 2) Pembangunan bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan manusia, akan tetapi dimaksudkan untuk mempebesar pilihan-pilihan manusia. Oleh kerana itu, konsep pembangunan manusia bukan hanya terpusat pada aspek ekonomi saja tetapi pada penduduk secara keseluruhan.
- 3) Pembangunan manusia memperhatikan upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal, bukan hanya upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia.
- 4) Empat pilar pokok yang mendukung pembangunan manusia, yaitu : produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- 5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam menentukan tujuan pembangunan serta dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, UNDP menjelaskan lebih dalam mengenai empat pilar pokok yang mendukung pembangunan manusia, yaitu:

- 1) Produktifitas

Masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitasnya dan ikut berpartisipasi dalam proses peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.

- 2) Pemerataan

Seluruh masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus.

Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh kesempatan yang ada agar dapat meningkatkan kualitas hidup.

3) Kestinambungan

Akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang akan tetapi juga generasi mendatang. Semua bentuk sumberdaya fisik manusia dan lingkungan harus selalu diperbaharui.

4) Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Masyarakat harus ikut berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka.

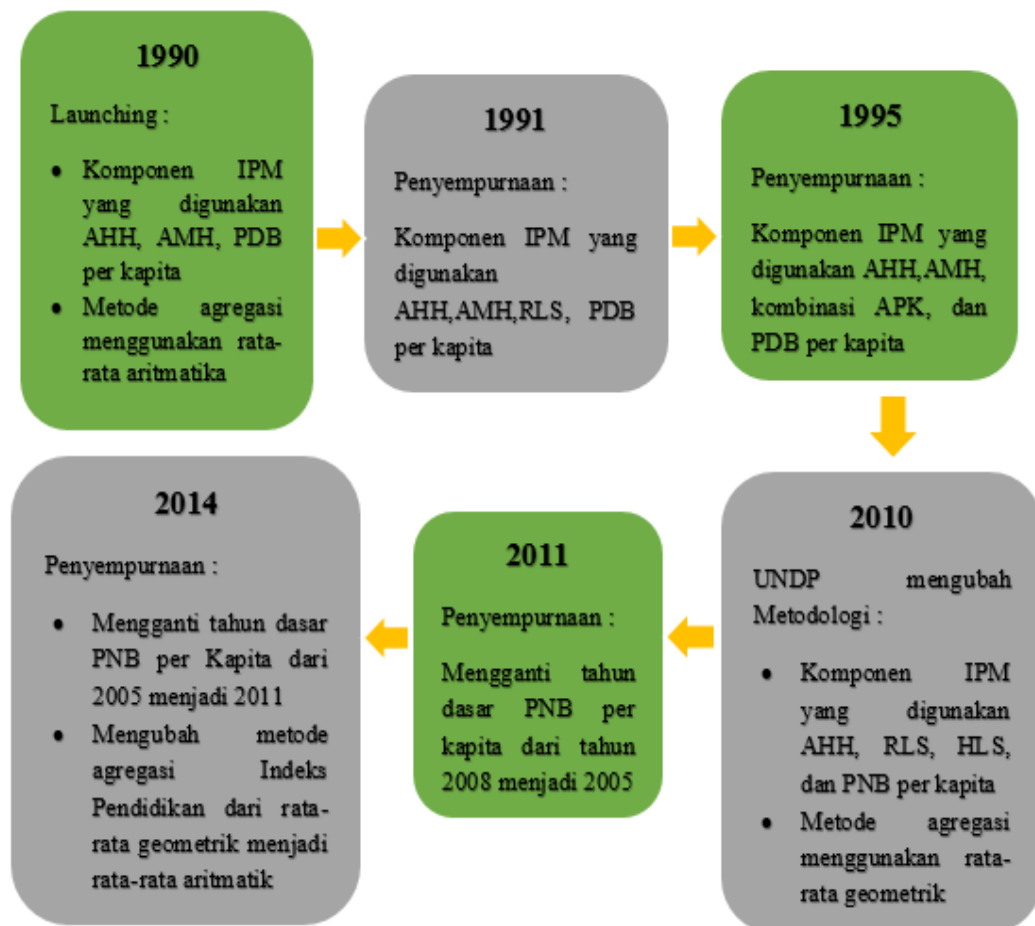
Pembangunan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi pembangunan dimaksudkan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat merupakan pusat perhatian dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia bukan hanya pada aspek ekonomi saja tetapi harus terpusat pada masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan manusia harus memperhatikan upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (*capability*) manusia saja.

## 2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP dalam Badan Pusat Statistik (2015) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia

berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, terdapat tiga dimensi dasar dalam perhitungan IPM, yaitu :

- 1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- 2) Pengetahuan (*knowledge*)
- 3) Standar hidup layak (*decent standard of living*).



Sumber : BPS, 2014

**Gambar 2.1**

Perubahan Metode Perhitungan IPM

Sejak awal diterbitkannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pada tahun 1990 sampai tahun 2014, metode perhitungan HDI telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1990 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung melalui pendekatan Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) untuk menghitung dimensi umur panjang dan sehat, Angka Melek Huruf (AMH) untuk menghitung dimensi standar hidup layak, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDB) per kapita untuk menghitung dimensi standar hidup layak, dengan metode agregasi menggunakan rata-rata aritmatik. Perubahan-perubahan metode perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.1.

Setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan metode perhitungan IPM yang dapat dilihat pada gambar 2.1 maka dapat disimpulkan bahwa metode perhitungan IPM yang digunakan pada saat ini yaitu : umur panjang dan hidup sehat yang diukur oleh komponen Angka Harapan Hidup (AHH); pengetahuan yang diukur oleh komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); dan standar hidup layak yang diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) setelah disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Perbedaan indikator metode lama dan metode baru dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru

<b>DIMENSI</b>	<b>METODE LAMA</b>	<b>METODE BARU</b>
<b>Indeks Harapan Hidup</b>	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
<b>Indeks Pendidikan</b>	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
<b>Indeks Standar Hidup Layak</b>	PDB Per Kapita	PNB Per Kapita
<b>Agregasi</b>	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik

Sumber : BPS,2014

1) Indeks Harapan Hidup

Jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah ditunjukkan oleh Indeks harapan hidup. Rata-rata lama hidup serta hidup sehat masyarakat dicerminkan dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun. Perhitungan angka harapan hidup menggunakan metode tidak langsung karena sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya (UNDP dalam Sari, 2016).

## 2) Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, UNDP memperkenalkan indikator baru pada indeks pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLM) atau *Expected Years of Schooling* (EYS). Indikator HLM menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dikarenakan indikator AMH sudah tidak relevan lagi karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. Cerminan dari indikator RLS merupakan gambaran dari terhadap keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan HLS merupakan gambaran dari lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu pada masa yang akan datang. Pada metode IPM lama populasi yang digunakan untuk mengukur IPM yaitu penduduk dengan rentan usia 15 tahun keatas, alasannya penduduk dengan usia tersebut sudah berhenti bersekolah. Sedangkan pada metode IPM baru populasi yang digunakan yaitu penduduk dengan usia 25 tahun ke atas, hal tersebut dikarenakan penduduk usia 25 tahun ke atas hanya sebagian kecil yang masih bersekolah. Padahal penduduk dengan usia 25 tahun merupakan stok pendidikan yang dimiliki suatu daerah.

## 3) Indeks Hidup layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP mengganti indikator Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi Produk



Nasional Bruto (PNB). PDB per kapita dianggap kurang dapat menggambarkan pendapatan disuatu daerah, karena dalam perhitungan PDB didapatkan dari hasil perhitungan seluruh faktor produksi dan juga investasi asing yang masuk, padahal tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati oleh seluruh masyarakat lokal. Pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan sedangkan pada metode lama terdapat 27 komoditas yang digunakan untuk menghitung paritas daya beli, alasan perlunya pembaharuan pada komoditas perhitungan paritas daya beli yaitu sejak diterbitkannya IPM pada tahun 1990 sampai sekarang telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat.

### **3. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia**

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan pada metodologi perhitungan IPM. Selain pada indikator IPM, perubahan terjadi juga pada cara perhitungan IPM. Perhitungan menggunakan metode aritmatik diubah menjadi metode geometrik. Perhitungan IPM dengan rumus rata-rata aritmatik menggambarkan bahwa capaian yang rendah dari suatu dimensi akan ditutupi capaian pada dimensi lain. Metode perhitungan aritmatik dapat menutupi ketimpangan pembangunan manusia disuatu daerah, hal ini tidak sesuai dengan konsep yang diusung dalam pembangunan manusia. Konsep dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan bukan ketimpangan pembangunan. Dengan alasan tersebut maka

perhitungan dengan menggunakan metode aritmatik dianggap belum optimal dan menghitung IPM.

Berdasarkan Tabel 2.1 terdapat tiga indikator dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan metode baru dalam suatu negara. Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
Persamaan Indeks Komponen IPM

<b>DIMENSI</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PERSAMAAN</b>
<b>Indeks Harapan Hidup</b>	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}_{\text{min}}}{\text{AHH}_{\text{maks}} - \text{AHH}_{\text{min}}}$
<b>Indeks Pendidikan</b>	Angka Melek Huruf (AMH)	$I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\text{min}}}{\text{HLS}_{\text{maks}} - \text{HLS}_{\text{min}}}$
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{maks}} - \text{RLS}_{\text{min}}}$
<b>Indeks Standar Hidup Layak</b>	PNB Per Kapita*	$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran})_{\text{min}}}{\ln(\text{Pengeluaran})_{\text{maks}} - \ln(\text{Pengeluaran})_{\text{min}}}$

Sumber : BPS, 2014

Keterangan :

- \* PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Berdasarkan perhitungan Indeks Komponen diatas maka IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran dengan rumus sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} + I_{Pendidikan} + I_{Pengeluaran} \times 100}$$

Dimana :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

$I_{Kesehatan}$  = Indeks Kesehatan

$I_{Pendidikan}$  = Indeks Pendidikan

$I_{Pengeluaran}$  = Indeks Pengeluaran

#### 4. Hubungan Antar Variabel

##### a) Hubungan antara Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Napitupulu dalam Trunajaya (2015) mengatakan bahwa dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia terdapat tiga indikator komposit yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita. Sektor kesehatan, pendidikan serta pendapatan per kapita yang meningkat dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga kualitas manusia yang semakin tinggi pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

Tingkat kemiskinan sangat mempengaruhi pembangunan manusia. Dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga indikator pembangunan manusia yang tidak dapat dicapai oleh masyarakat miskin

yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka akan berpengaruh pada rendahnya kualitas manusia.

Semakin tinggi jumlah penduduk miskin menyebabkan akses terhadap kegiatan ekonomi mengalami hambatan, hal tersebut dikarenakan penduduk miskin memiliki keterbatasan pada faktor produksi. Produktivitas yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang rendah pula. Dampak dari pendapatan yang rendah yaitu sulitnya penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan. Apalagi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya juga akan mengalami keterhambatan. Sehingga, keberhasilan pembangunan manusia disuatu daerah akan terhambat apabila pada daerah tersebut terdapat cukup banyak penduduk miskin.

- b) Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah pada bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa dalam menunjang pembangunan nasional pemerintah

menempatkan pendidikan sebagai salah satu faktor penting (Winarti, 2014).

Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu investasi sumber daya manusia. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dapat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak. Investasi ini dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang peningkatan modal manusia karena dengan adanya pendidikan manusia dapat meningkatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, inovasi maupun kreativitas. Sehingga dapat mendorong kualitas sumber daya manusia. Apabila kualitas sumber daya manusia tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas sehingga tujuan dari pembangunan manusia dapat tercapai.

c) Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah pada sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, hal tersebut sesuai

dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masalah kesehatan harus diprioritaskan (Astri dkk, 2013).

Salah satu indikator penunjang pembangunan manusia adalah kesehatan, karena bila daya tahan tubuh baik maka akan berpengaruh terhadap produktivitas manusia yang dapat dioptimalkan. Pada saat sehat orang dapat menjalankan aktivitas lainnya seperti bersekolah, bekerja, berolahraga, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya dapat dikerjakan lebih baik dibandingkan saat kondisi tubuh sedang sakit.

Menurut Dewi Kacabiru (2013) kesehatan merupakan salah satu faktor penting dan menjadi dasar dalam pembangunan manusia. Manusia yang sehat menjadi prasyarat dalam mewujudkan pembangunan manusia. Pendanaan serta sumber daya yang terbatas mengakibatkan penanganan masalah kesehatan tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu, prioritas program dan kegiatan perlu dilakukan. Selain itu, penanganan masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan merupakan suatu investasi publik. Kesehatan yang baik bagi setiap manusia dapat terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Semakin besar pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan kemungkinan masyarakat yang sehat akan semakin banyak, sehingga akan

meningkatkan produktivitas masyarakat. produktivitas yang tinggi juga akan diikuti dengan peningkatan Indeks Pembangunan manusia di suatu daerah.

Menurut Arifin (2015) kesehatan turut serta dalam membantu peningkatan pembangunan manusia, karena manusia yang sehat akan jauh lebih baik daripada manusia yang kurang sehat. Perubahan yang baik dipengaruhi oleh kesehatan yang baik, sebaliknya perubahan yang buruk atau kurang baik dipengaruhi oleh kesehatan yang buruk pula. Karena tanpa kesehatan manusia tidak memiliki semangat produktivitas.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ilza Putra Tunajaya (2015) dengan judul penelitian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Seluruh Provinsi Indonesia dengan menggunakan regresi data panel menunjukkan bahwa terdapat lima dari tujuh variabel yang berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel infrastruktur pendidikan, kesehatan, APBD, ketimpangan dan PDRB berpengaruh positif terhadap IPM sedangkan variabel buta huruf dan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rosinta Dewi Kacabiru (2013) dengan judul penelitian Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan data panel dengan pendekatan *fixed effect model* menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan variabel *independent* yaitu

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, rasio kemiskinan terhadap jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan, rasio murid SMA terhadap guru berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kecuali dua variabel *independent* yaitu rasio murid SD terhadap guru dan rasio murid SMP terhadap guru tidak mempengaruhi IPM di Papua. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dibuat sebelumnya karena masih banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua yang belum memadai.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Septiana M. M. Sanggelorang dkk (2015) yang berjudul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Safitri (2016) dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap Indeks



Pembangunan Manusia dengan tingkat signifikansi berbeda-beda. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurbaeti (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2013 menggunakan analisis regresi data panel model efek tetap (FEM) dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia baik secara parsial maupun bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
6. Penelitian yang dilakukan oleh Denni Sulistio Mirza (2008) dengan judul Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah menggunakan analisis data panel dengan model *Pooled Least Square (Common Effect)*, model Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*), Model Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*). Hasil penelitian menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan

pemerintah. Variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah.

7. Penelitian yang dilakukan Mochammad Yuli Arifin (2015) dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur 2006-2013 menggunakan analisis data panel dengan Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*), Model Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*). Hasil penelitian menunjukkan. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

**Tabel 2.3**

Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
1.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Seluruh Provinsi Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Ilza Putra Trunajaya (2015)	Analisis Data Panel	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB) 5. Ketimpangan	1. IPM di seluruh Provinsi di Indonesia berada pada daerah berkembang yaitu berkisar antara 0,50-0,79 2. Variabel infrastruktur pendidikan, kesehatan,

			6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 7. Buta huruf 8. Kemiskinan	APBD, ketimpangan dan PDRB berpengaruh positif terhadap IPM. 3. Variabel buta huruf dan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM
2.	Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan oleh Rosinta Dewi Kacabiru (2013)	Analisis data panel dengan pendekatan <i>fixed effect model</i>	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 3. Pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan 4. Rasio kemiskinan terhadap jumlah penduduk 5. Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter 6. Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan 7. Rasio murid SMA terhadap guru 8. Rasio murid SD terhadap guru	1. Provinsi Papua dari tahun 2004-2010 memiliki IPM yang paling kecil diantara provinsi-provinsi yang lain. 2. Produk Domesti Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, rasio kemiskinan terhadap jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan, rasio murid SMA terhadap guru berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua. 3. Rasio murid SD terhadap guru

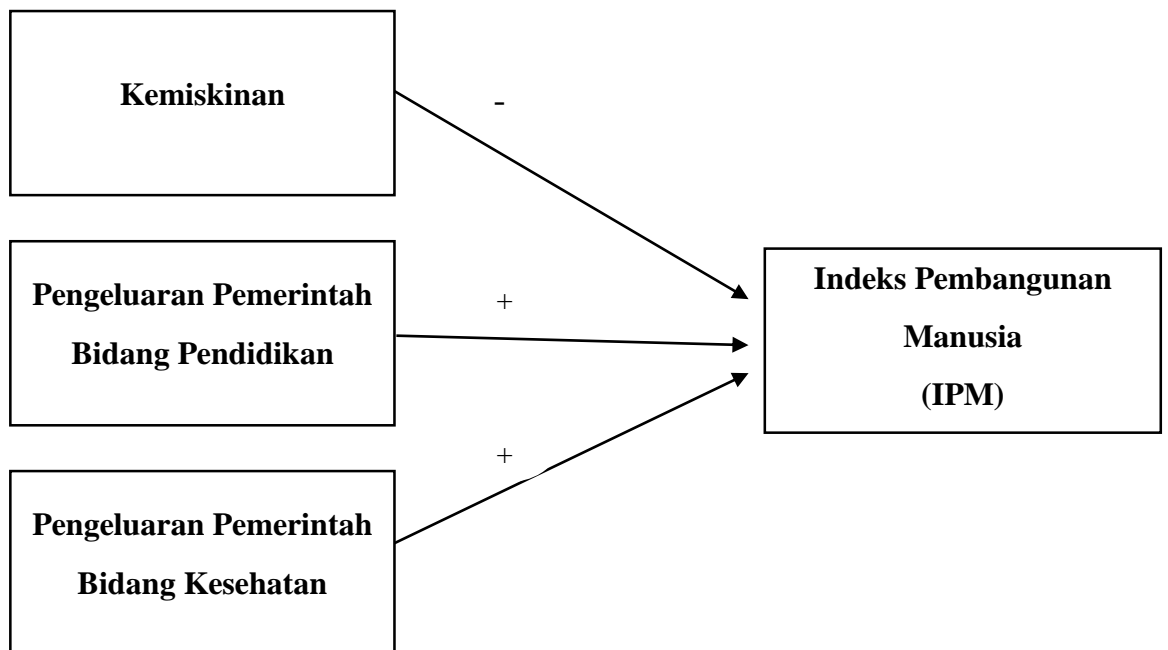
			9. Rasio murid SMP terhadap guru	dan rasio murid SMP terhadap guru tidak mempengaruhi IPM di Papua
3.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan oleh Septiana M.M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, dan Hanly F. DJ. Siwu (2016)	Analisis regresi berganda	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 3. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh oleh Intan Safitri (2016)	Analisis regresi data panel	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan. 4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur	1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

5.	Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2013. Penelitian ini dilakukan oleh Nurbaeti (2013)	Analisis regresi data panel model efek tetap (FEM) dengan metode <i>Generalized Least Square</i> (GLS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</li> <li>2. Pengangguran</li> <li>3. Pertumbuhan ekonomi</li> <li>4. Pengeluaran Pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Alokasi pengeluaran pemerintah khususnya sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol>
6.	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah . Penelitian ini dilakukan oleh Denni Sulistio Mirza (2008)	Analisis data panel dengan model : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pooled Least Square (Common Effect)</i></li> <li>• Pendekatan Efek Tetap (<i>Fixed Effect</i>)</li> <li>• Pendekatan Efek Acak (<i>Random Effect</i>)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</li> <li>2. Kemiskinan</li> <li>3. Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>4. Belanja Modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan pemerintah.</li> <li>2. Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5%</li> </ol>

				<p>terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>3. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>4. Belanja modal mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.</p>
7.	<p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur 2006-2013 oleh Mochammad Yuli Arifin (2015)</p>	<p>Analisis regresi data panel</p>	<p>1. Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan</p> <p>3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan</p> <p>4. Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>1. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur</p> <p>2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur</p>

### C. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis :



**Gambar 2.2**

Kerangka Pemikiran Teoritis

### D. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mulai dari pemaparan latar belakang hingga kerangka pemikiran teoritis, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut :

- 1) Diduga Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011-2015.
- 2) Diduga Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011-2015.
- 3) Diduga Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011-2015.